



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUDIRMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **214753**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.910.000.000

1. Tanah Seluas 4702 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/200 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 1500 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 310.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 145.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 12.150.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 90.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.157.150.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.157.150.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.